

INTISARI

Sistem perencanaan pembangunan di Indonesia menggunakan pendekatan yang memadukan pendekatan dari atas (*top down planning*) dan pendekatan dari bawah (*bottom up planning*) melalui peran yang seimbang. Diterapkannya pendekatan tersebut tidak lepas dari upaya pemerintah dalam mewujudkan prinsip desentralisasi dalam Perencanaan Pembangunan Nasional. Implementasi prinsip desentralisasi dapat dilihat dari nilai keterkaitan antar dokumen perencanaan daerah dan desa. Untuk mengetahui nilai keterkaitan dokumen antara perencanaan daerah dan desa dapat dilihat dari ada tidaknya program prioritas pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Semakin tinggi nilai keterkaitan antar dokumen perencanaan daerah dan desa mengindikasikan semakin baiknya implementasi prinsip desentralisasi. Namun demikian, belum semua desa di Indonesia telah memiliki dokumen RPJMDes. Kabupaten Gunungkidul merupakan daerah yang telah memiliki RPJMDes, dengan tersedianya dokumen RPJMDes perwujudan prinsip desentralisasi di Kabupaten Gunungkidul semestinya semakin baik. Namun nyatanya, implementasi desentralisasi pembangunan di Kabupaten Gunungkidul saat ini belum terlaksana dengan baik. Hal ini dari adanya suatu program prioritas pembangunan daerah tidak terdapat dalam program di dokumen RPJMDes sehingga program tersebut tidak dapat terimplementasi dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi keterkaitan antara program prioritas RPJMD dan program RPJMDes di Kabupaten Gunungkidul dan untuk menemukan faktor-faktor penyebab terkait atau tidak terkaitnya program prioritas RPJMD dan program RPJMDes di Kabupaten Gunungkidul.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif dengan metode analisis isi untuk mengidentifikasi keterkaitan antara program prioritas RPJMD dan program RPJMDes di Kabupaten Gunungkidul serta metode kualitatif untuk menemukan faktor-faktor penyebab terkait atau tidak terkaitnya program prioritas RPJMD dan program RPJMDes di Kabupaten Gunungkidul. Identifikasi keterkaitan antar dokumen melalui analisis isi dilakukan dengan cara melihat ada atau tidaknya program prioritas pembangunan tahunan daerah dalam program pembangunan tahunan desa, sedangkan untuk faktor-faktor penyebab keterkaitan didapatkan dari identifikasi dokumen-dokumen terkait serta hasil wawancara informan dengan teknik *snowball*.

Penelitian ini menemukan bahwa program dalam RPJMDes Kabupaten Gunungkidul telah memiliki keterkaitan dengan program prioritas pada RPJMD, namun demikian antar program prioritas satu dan lainnya memiliki nilai keterkaitan yang berbeda. Faktor utama yang mempengaruhi nilai keterkaitan program merupakan kualitas SDM yang menyusun RPJM desa. Rendahnya kualitas SDM serta kurangnya campur tangan fasilitator ahli mengakibatkan tingkat pengetahuan akan penyusunan RPJM desa minim sehingga nilai keterkaitannya rendah.

ABSTRACT

The development planning system in Indonesia utilized the ‘top down’ and ‘bottom up’ planning approach through a balanced role. The implementation of these approaches was the effort of the government to realizing the principle of decentralization in the National Development Planning. Implementation of the decentralization principle could be seen from the linkages between the regional and village development planning documents. The linkages between regional and village planning documents could be seen from the existence of development priority program of “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah” (RPJMD) in “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa” (RPJMDes). The higher the linkages between regional and village development planning documents indicated better implementation of decentralization principles. However, not all villages in Indonesia had RPJMDes documents. Gunungkidul District was an area that already had RPJMDes, therefore the realization of decentralization principle in Gunungkidul District should be better. But in fact, the implementation of decentralization of development in Gunungkidul District has not been done properly. That caused by some regional development priority program that not exist in the RPJMDes document so that the program couldn’t be implemented properly. The purpose of this research was to indentify the linkages between RPJMD priority program and RPJMDes program in Gunungkidul District and to found the causative factors of linkages between RPJMD program and RPJMDes program in Gunungkidul District.

This research used deductive approach with content analysis method to identify the linkages between RPJMD priority programs and RPJMDes program in Gunungkidul District and qualitative method to find causative factors of linkages between between RPJMD priority programs and RPJMDes program in Gunungkidul District. Identification of the linkages between those documents was done through analyzing the existence of regional annual priority development programs in the village's annual development program, while the causative factors of linkages obtained from identification of relevant documents and interviews with ‘snowball’ techniques.

This study found that the program in RPJMDes of Gunungkidul Regency had linkages with the priority programs in RPJMD, however the priority programs has different value of interrelationships between one another. The main factor that affected the linkages of the programs is the quality of the human resource that makes up the RPJMDes, the low quality of human resources and the quality of the expert facilitators result in the level of knowledge would made the RPJMDes minimal so that the value of the linkages was low.